

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Anggaran Moge Listrik Rp 6,3 Miliar Lolos

Palmerah, Warta Kota

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak heran dengan anggaran pembelian motor gede (moge) listrik untuk Patwal Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 bisa lolos dalam pembahasan. Padahal nilai pembelian lima unit motor di Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu sangat fantastis mencapai Rp 6,3 miliar.

"Itu (usulan anggaran) tidak pernah disampaikan secara detail dalam (pembahasan) APBD 2024. Kalau kami tahu, pasti ditolak," ujar Gilbert pada Rabu (12/3/2024).

Gilbert mengatakan, usulan anggaran itu tidak disampaikan secara mendetail sebagai motor gede (moge) listrik dengan harga satuan Rp 1,26 miliar. Artinya usulan itu, lanjut dia, sangat mungkin disebutkan sebagai kendaraan dinas.

"Akhirnya saya marah, lalu ditunda lagi rapat. Saya marah sekali karena selalu berubah saat mau final, dirubah sepihak oleh SKPD terkait atau pihak lainnya, saya tidak jelas," tuturnya.

Menurut dia, dalam pembahasan APBD 2024 kerap terjadi perubahan setiap saat, terkait jumlah dan rencana kegiatan. Bahkan, kata dia, apa yang sudah disepakati dalam rapat komisi, bisa berubah saat penyampaian di akhir acara.

"Djubah seenaknya dan sepihak oleh eksekutif. Siapa yang seharusnya mengontrol itu? Ya Kadis terkait, Bappeda, dan Asisten terkait," kata Gilbert.

Dia berujar, kejadian ini merupakan kesalahan mendasar dalam pengelolaan APBD yang tidak pro kepada rakyat. Dia lalu mempersilakan eksekutif untuk menyusun APBD tanpa melibatkan dewan.

"Artinya kalau Dishub mengatakan disetujui, kondisinya demikian. Rapat APBD 2024 di Mega Mendung (Grand Cempaka Resort) itu tidak baik dari segi transparansi," jelasnya.

Sudah Dibahas

Diketahui, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengklaim, rencana pembelian motor listrik itu telah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Pembahasan itu telah dilakukan bersama-sama dengan legislatif pada 2023 lalu.

"Anggaran pembelian motor listrik sudah dibahas dalam pembahasan RAPBD TA 2024. Pembelian motor besar listrik tersebut sesuai InPres No 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan

Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Syafrin, kepada wartawan, Minggu (10/3/2024).

Menurutnya, motor listrik ini nantinya menggantikan motor Patwal sebelumnya yang sudah tua. Motor listrik itu untuk pengawalan Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih.

"Selain itu motor listrik besar tersebut untuk menggantikan motor besar Dishub yang usianya sudah tua, dan nantinya peruntukannya adalah untuk Pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih nantinya," jelas Syafrin. (faf)